

## **Analisis Hukum Terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam Suatu Perusahaan**

**Maura Hanisa Az'zahra<sup>1\*</sup>, Theresia Lintang Wahyuningsih<sup>2</sup>, Dewi Atriani<sup>3</sup>, Pitaloka Alif Savitri<sup>4</sup>, Jeremia Lorenzo Stefano<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: [maura4617@gmail.com](mailto:maura4617@gmail.com)<sup>1</sup>, [thereaiamemey@gmail.com](mailto:thereaiamemey@gmail.com)<sup>2</sup>, [dewiatriani@fh.unmul.ac.id](mailto:dewiatriani@fh.unmul.ac.id)<sup>3</sup>, [pitalokasavitri@gmail.com](mailto:pitalokasavitri@gmail.com)<sup>4</sup>, [jlorenjo1@gmail.com](mailto:jlorenjo1@gmail.com)<sup>5</sup>

### **Abstract:**

*Legal analysis of corporate financial transparency and accountability is an important study in the context of corporate governance and financial market integrity. In an information-driven environment, transparency in financial reporting is key to ensuring stakeholder trust and market efficiency. However, the lack of transparency and accountability in financial reporting is often a disturbing issue, raising questions about the legal framework that regulates it and the legal implications of these practices. A lack of transparency in financial reporting not only creates risks for stakeholders, such as investors and creditors, but can also disrupt market efficiency by increasing asymmetric information. Therefore, law enforcement against financial reporting violations is important in ensuring company compliance with applicable transparency standards.*

### **Abstract**

Analisis hukum terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan merupakan kajian yang penting dalam konteks tata kelola perusahaan dan integritas pasar keuangan. Dalam lingkungan yang didorong oleh informasi, transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi kunci untuk memastikan kepercayaan pemangku kepentingan dan efisiensi pasar. Namun, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan seringkali menjadi isu yang mengganggu, yang memunculkan pertanyaan tentang kerangka hukum yang mengaturnya serta implikasi hukum dari praktik-praktik tersebut. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan tidak hanya menciptakan risiko bagi pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditur, tetapi juga dapat mengganggu efisiensi pasar dengan meningkatkan informasi asimetris. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaporan keuangan menjadi penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar transparansi yang berlaku.

### **Article History**

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

### **Keywords :**

Transparency, Accountability, Finance

### **Keywords:**

Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11541497>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas menurut Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability (1985) dalam Kristiana (2014) adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan.

Akuntabilitas sering diartikan responsibility dan accountability, Perbedaan responsibility dan accountability dijelaskan oleh Silvia dan ansor (2011) bahwa responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, pertanggung jawaban ini digunakan dalam instansi pemerintah.

Akuntabilitas adalah pemegang amanah memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas maupun yang beradadi bawah kendalinya kepada pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Transparansi bermakna keterbukaan suatu organisasi dalam menginformasikan mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pihak yang membutuhkan informasi . Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan untuk mengakses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola

sumber daya. Transparansi ditinjau dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informai sehingga masyarakat dapat mencapai tiga segi pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Akuntabilitas dan Transparansi adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik serta adanya suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi memberikan informasi yang terbuka serta jujur terhadap masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka yang paling penting diterapkannya prinsip-prinsip seperti Akuntabilitas dan Transparansi dalam proses pelayanan public.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan suatu perusahaan. Agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi).

Pada masa sekarang ini setiap aktifitas lembaga dituntut adanya akuntabilitas bagi pelayanan publik, pentingnya akuntabilitas dan tranparasi bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi, nepotisme, dan kolusi terhadap dana-dana publik, baik level negara, swasta, tak terkecuali dikalangan organisasi nirlaba (Fahrudin,2003). Begitu juga dengan transparansi ini diatur dalam (undang-undang no 14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi publik, dimana setiap badan publik wajib memberikan keterbukaan informasi public.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (2011: 30) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Creswell (2009: 25) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. Menurut Kirk dan Miller (2010: 35) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Factor yang mempengaruhi kurangnya transparansi dalam laporan keuangan Perusahaan**

Transparansi dalam laporan keuangan merupakan pilar utama dalam menentukan integritas dan kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan. Namun, dalam realitasnya, kekurangan transparansi dalam laporan keuangan seringkali terjadi dan menimbulkan beragam implikasi yang tidak diinginkan. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu dari kurangnya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kurangnya transparansi dalam laporan keuangan adalah praktek akuntansi yang ambigu atau subyektif. Meskipun standar akuntansi telah ditetapkan, namun masih ada ruang bagi interpretasi yang beragam. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempresentasikan kinerja mereka dengan cara yang lebih menguntungkan, bahkan jika hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Misalnya, penggunaan metode akuntansi yang berbeda dalam mengukur nilai aset atau pendapatan dapat menghasilkan informasi yang tidak konsisten dan membingungkan bagi para pemangku kepentingan.

Tekanan dari pihak eksternal seperti investor, kreditur, atau analis keuangan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya transparansi. Perusahaan seringkali merasa terdorong untuk menyajikan laporan keuangan yang terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya untuk menjaga atau

meningkatkan harga saham mereka atau untuk memperoleh akses lebih mudah ke sumber-sumber pendanaan. Dalam situasi ini, kepentingan jangka pendek untuk memenuhi ekspektasi pasar seringkali mengalahkan kebutuhan akan transparansi yang sejati.

Selain itu, kurangnya pengawasan atau regulasi yang efektif juga dapat menjadi penyebab kurangnya transparansi dalam laporan keuangan. Di beberapa yurisdiksi, peraturan yang mengatur pelaporan keuangan mungkin kurang ketat atau kurang ditegakkan dengan tegas, sehingga memungkinkan praktik-praktik yang meragukan untuk berlangsung tanpa diketahui. Bahkan di negara-negara dengan regulasi yang ketat, masih mungkin bagi perusahaan untuk menemukan celah atau menggunakan teknik kreatif untuk menghindari kewajiban pelaporan yang sebenarnya.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan adalah pendidikan dan kesadaran yang lebih baik, baik di kalangan manajemen perusahaan maupun para pemangku kepentingan eksternal. Manajemen perusahaan perlu memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sebagai bagian integral dari tanggung jawab mereka kepada para pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan ini juga perlu diterapkan pada para auditor dan profesional akuntansi lainnya yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan keuangan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi dan etika profesi.

Selain itu, teknologi juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dapat memungkinkan transaksi keuangan untuk dicatat secara aman dan transparan, dengan jejak audit yang tidak dapat diubah. Ini dapat mengurangi kemungkinan manipulasi atau kecurangan dalam pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan.

Regulasi yang lebih ketat juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Pemerintah dan otoritas pengatur perlu menetapkan standar yang jelas dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, analis keuangan, dan lembaga keuangan juga penting dalam menekan perusahaan untuk mematuhi standar yang lebih tinggi dalam pelaporannya.

Perlu diingat bahwa transparansi bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta membangun kepercayaan yang kokoh dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan haruslah terus menerus, sejalan dengan perkembangan bisnis dan perubahan lingkungan eksternal.

Selain faktor-faktor tersebut, kepentingan internal perusahaan juga dapat berperan dalam mempengaruhi transparansi dalam laporan keuangan. Kepentingan manajemen untuk mempertahankan citra positif perusahaan atau untuk mendukung rencana strategis tertentu seringkali dapat menyebabkan informasi yang relevan disajikan secara selektif atau disembunyikan sama sekali.

Kompleksitas bisnis yang semakin meningkat juga dapat menjadi faktor yang mempersulit transparansi dalam laporan keuangan. Dengan berbagai transaksi keuangan yang melibatkan berbagai entitas dan yurisdiksi, serta instrumen keuangan yang kompleks, menyajikan informasi keuangan yang jelas dan terperinci menjadi semakin sulit.

Dalam mengatasi masalah kurangnya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, diperlukan upaya yang holistik. Regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif, pendidikan dan kesadaran yang lebih baik, serta tekanan dari para pemangku kepentingan untuk transparansi yang lebih tinggi semua dapat membantu memperbaiki situasi ini. Pada akhirnya, transparansi yang kuat dalam pelaporan keuangan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang sehat.

### **Peran hukum dalam peningkatan ransparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan**

Undang-Undang Transparansi Perusahaan (CTA), yang disahkan pada tahun 2021, disahkan untuk meningkatkan transparansi dalam struktur dan kepemilikan entitas guna memerangi pencucian uang, penipuan pajak, dan aktivitas terlarang lainnya.

Undang-Undang Transparansi Perusahaan (CTA), yang disahkan pada tahun 2021, disahkan untuk meningkatkan transparansi dalam struktur dan kepemilikan entitas guna memerangi pencucian uang, penipuan pajak, dan aktivitas terlarang lainnya. Hal ini dirancang untuk menangkap lebih banyak informasi tentang kepemilikan entitas tertentu yang beroperasi di atau mengakses pasar AS. Undang-undang ini pada awalnya diabaikan oleh para profesional akuntansi. Namun, Undang-Undang Transparansi Perusahaan akan segera berlaku pada 1 Januari 2024 dan masyarakat mulai panik.

Perusahaan mencari informasi lebih lanjut mengenai Undang-Undang Transparansi Perusahaan, pengaruhnya terhadap operasi mereka, dan rincian persyaratan pelaporannya. Hal ini memberikan peluang unik bagi kantor akuntan dan profesional akuntansi pajak untuk meningkatkan aliran pendapatan mereka dengan mendiversifikasi penawaran layanan mereka.

### **Subjek yang terpengaruh oleh Undang-Undang Transparansi Perusahaan?**

Menurut laporan Small Business Administration baru-baru ini, 27.104.006 usaha kecil disebut “perusahaan non-pekerja” dan tidak memiliki karyawan. Undang-undang Transparansi Perusahaan dirancang untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha melalui pelaporan Informasi Kepemilikan Manfaat (BOI) dan secara khusus ditujukan kepada usaha-usaha kecil ini.

Perusahaan pelapor diidentifikasi baik dalam maupun luar negeri: Perusahaan pelapor domestik adalah korporasi, LLP, atau entitas lain apa pun yang didirikan dengan mengajukan dokumen kepada sekretaris negara atau kantor serupa berdasarkan hukum suatu negara bagian atau suku Indian. Perusahaan pelapor asing adalah korporasi, LLC, atau entitas lain yang dibentuk berdasarkan hukum negara asing yang terdaftar untuk melakukan bisnis di yurisdiksi negara bagian atau suku mana pun dengan mengajukan dokumen ke sekretaris negara atau kantor serupa. Kepemilikan tunggal yang tidak menggunakan anggota tunggal LLC tidak dianggap sebagai perusahaan pelapor.

Perusahaan pelapor biasanya meliputi

1. Kemitraan tanggung jawab terbatas
2. Kemitraan terbatas dengan tanggung jawab terbatas
3. Kepercayaan bisnis
4. Sebagian besar kemitraan terbatas, di mana entitas umumnya dibuat berdasarkan pengajuan ke sekretaris negara atau kantor serupa.

Pengecualian mencakup penerbit sekuritas, otoritas pemerintah dalam negeri, bank, dan banyak lagi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

### **Pemilik yang bermanfaat**

Pemilik manfaat dapat masuk ke dalam salah satu dari dua kategori yang didefinisikan sebagai setiap individu yang, secara langsung atau tidak langsung,:

1. Melakukan pengendalian substansial terhadap perusahaan pelapor, atau
2. Memiliki atau menguasai paling sedikit 25% kepemilikan perusahaan pelapor.

Memiliki dua kategori dirancang untuk menutup celah dan memastikan semua pemilik teridentifikasi. Perbedaan utamanya adalah Beneficial Ownership dikategorikan sebagai kepemilikan yang kepentingan kepemilikannya tercermin melalui kepentingan modal dan keuntungan dalam perusahaan. Pemilik manfaat harus melaporkan kepada FinCEN nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor pengenalan unik mereka dari yurisdiksi penerbit yang diakui serta foto dokumen tersebut. Jika seseorang memutuskan untuk mengajukan informasinya ke FinCEN secara langsung, mereka mungkin akan diberikan “pengidentifikasi FinCEN” yang dapat diberikan pada laporan BOI, bukan informasi yang diperlukan.

### **Kapan laporan perlu diajukan untuk Undang-Undang Transparansi Perusahaan**

UU Transparansi Perusahaan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Perusahaan pelapor yang berdiri pada tanggal efektif wajib menyampaikan laporan awalnya dalam waktu satu tahun. Perusahaan pelapor yang didirikan setelah tanggal efektif mempunyai waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan pembuatan atau pendaftarannya. Namun, FinCEN mengusulkan perpanjangan batas waktu awal penyampaian laporan BOI dari 30 menjadi 90 hari untuk entitas yang didirikan atau didaftarkan pada tahun 2024.

Laporan harus diperbarui dalam waktu 30 hari sejak adanya perubahan pada kepemilikan

manfaat, misalnya, melalui penjualan suatu bisnis, merger, akuisisi, atau kematian, atau 30 hari setelah menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui ketidakakuratan informasi yang diajukan sebelumnya.

### **Dampak Undang-Undang Transparansi Perusahaan terhadap profesional perpajakan dan akuntansi**

Karena Undang-Undang Transparansi Perusahaan terkait dengan inisiatif anti-pencucian dan akuntabilitas keuangan, banyak perusahaan secara naluriah akan meminta bantuan profesional akuntansi mereka. Hal ini menawarkan kesempatan bagi para profesional akuntansi untuk memperluas cakupan layanan konsultasi yang ditawarkan. Memastikan catatan perusahaan terkini di kantor akuntan dan dalam database FinCEN akan memerlukan peningkatan aktivitas uji tuntas dan penilaian risiko. Dengan hukuman yang tinggi dan potensi hukuman penjara, hal ini merupakan area yang harus diawasi secara ketat. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman yang tinggi dan kemungkinan hukuman penjara. Denda yang meningkat berkisar dari \$500 hingga \$10.000 per pelanggaran dan hukuman penjara hingga dua tahun. Untuk tetap patuh, diperlukan pemantauan berkala terhadap perubahan dan pembaruan Undang-Undang Transparansi Perusahaan. Mengikuti perkembangan terkini seperti ini dan perubahan lokal, negara bagian, dan federal lainnya menjadi mudah melalui alat penelitian akuntansi dan pajak.

### **Penerapan Undang-Undang Transparansi Perusahaan**

Layanan akuntansi mencakup berbagai bidang yang membawa risiko, seperti pelaporan keuangan, kepatuhan pajak, merger dan akuisisi, dan pengendalian internal. Kini mereka dapat menambahkan kepatuhan terhadap pelaporan Informasi Beneficial Ownership.

Berinvestasi pada alat penelitian berkualitas seperti Checkpoint Edge akan membantu mempersiapkan transisi dan memperkuat layanan konsultasi profesional dengan informasi terkini di ujung jari Anda. Karena sebagian besar bisnis yang menjadi sasaran Undang-Undang Transparansi Perusahaan di AS adalah usaha kecil, yang banyak di antaranya dianggap sebagai perusahaan non-pemberi kerja, terdapat peluang untuk memberikan nilai lebih dengan menawarkan layanan konsultasi dan administrasi pelaporan serta pemantauan kepatuhan. Ambil beban administratif dari usaha kecil dan masukkan ke dalam paket konsultasi.

### **Upaya yang bisa dilakukan karyawan dalam menindaklanjuti masalah Transapransi serta Akuntabilitas tersebut?**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam dunia kerja yang memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dalam organisasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi, kepercayaan karyawan, serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi karyawan untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti masalah-masalah ini. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan karyawan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja:

#### **a. Mengajukan Pertanyaan yang Konstruktif**

Karyawan harus merasa berani dan didorong untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan konstruktif mengenai proses, keputusan, dan kebijakan perusahaan. Dengan mengajukan pertanyaan, karyawan dapat mendorong pimpinan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci, sehingga dapat membantu memperjelas kebijakan dan keputusan yang mungkin masih ambigu atau tidak transparan.

#### **b. Meningkatkan Komunikasi Internal**

Transparansi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Karyawan dapat membantu meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa informasi penting dibagikan secara merata dan jelas di seluruh organisasi. Ini bisa dilakukan melalui rapat rutin, buletin internal, atau platform komunikasi digital seperti intranet perusahaan. Dengan meningkatkan aliran informasi, karyawan dapat memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

#### **c. Mengadopsi Teknologi untuk Akuntabilitas**

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Karyawan dapat mendorong penggunaan sistem manajemen proyek, perangkat lunak pelacakan waktu, atau platform kolaborasi yang dapat memantau dan mendokumentasikan kontribusi individu dan tim terhadap proyek tertentu. Dengan adanya jejak digital, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan mengukur kinerja.

d. Mengembangkan Budaya Kerja yang Terbuka

Budaya kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas harus dimulai dari atas namun diterapkan oleh semua lapisan organisasi. Karyawan dapat berperan dalam mengembangkan budaya ini dengan memberikan umpan balik yang jujur, menghargai integritas, dan mempraktikkan kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan mendukung nilai-nilai ini, karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja di mana semua orang merasa dihargai dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

e. Menyusun Laporan dan Dokumentasi yang Jelas

Karyawan dapat memastikan bahwa semua laporan, dokumentasi, dan catatan kerja dibuat dengan jelas dan lengkap. Ini tidak hanya membantu dalam audit internal dan eksternal, tetapi juga memastikan bahwa semua proses dan keputusan dapat ditinjau dan dipertanggungjawabkan. Dengan dokumentasi yang baik, setiap keputusan dan tindakan dapat dilacak kembali ke sumbernya, yang membantu dalam menjaga akuntabilitas.

f. Mendorong Pelatihan dan Pengembangan

Pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dapat sangat membantu. Karyawan dapat mendorong manajemen untuk menyediakan pelatihan berkala mengenai praktik terbaik dalam transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini, karyawan akan lebih siap untuk mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari.

g. Membentuk Tim atau Komite Pengawas

Karyawan juga dapat mengusulkan pembentukan tim atau komite pengawas yang bertugas memantau praktik transparansi dan akuntabilitas di perusahaan. Tim ini dapat terdiri dari perwakilan berbagai departemen dan bertanggung jawab untuk meninjau kebijakan, mengidentifikasi area perbaikan, dan memberikan rekomendasi kepada manajemen.

## SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Karyawan memainkan peran krusial dalam menegakkan dan mempromosikan prinsip-prinsip ini. Melalui komunikasi yang efektif, penggunaan teknologi, pelatihan yang berkelanjutan, serta penerapan budaya kerja yang jujur dan terbuka, karyawan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja. Dengan demikian, organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien, adil, dan mendapatkan kepercayaan lebih dari karyawan serta pemangku kepentingan lainnya.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan adalah masalah yang memiliki implikasi luas dan mendalam, baik dari perspektif hukum, ekonomi, maupun sosial. Dari analisis hukum, ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang diatur oleh otoritas keuangan dan pasar modal. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan adalah akurat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

Secara hukum, perusahaan yang gagal memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan dapat menghadapi sanksi yang signifikan. Sanksi tersebut bisa berupa denda finansial, pembekuan aset, hingga pencabutan izin operasional. Selain itu, individu yang terlibat dalam manipulasi atau penggelapan data keuangan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat berdampak negatif pada nilai saham perusahaan dan meningkatkan biaya modal. Investor cenderung menghindari

perusahaan yang tidak dapat dipercaya dalam pelaporan keuangannya, sehingga perusahaan tersebut akan kesulitan untuk mengakses pembiayaan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan jika tidak ditangani dengan baik.

Secara sosial, perusahaan yang tidak transparan dalam pelaporan keuangan sering kali kehilangan kepercayaan dari konsumen dan masyarakat. Kepercayaan adalah aset penting bagi perusahaan; tanpa kepercayaan, perusahaan akan kesulitan mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Ketidakpercayaan publik juga dapat menyebabkan boikot terhadap produk atau layanan perusahaan, yang pada akhirnya merugikan kinerja bisnis.

## **REFERENSI**

- Kristiana, N. (2014). Analisis transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada organisasi layanan publik Kab. Gresik). Universitas Muhammadiyah Gresik
- Nasirah, (2016), Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau), Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 170–178.
- Mungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta
- undang-undang no 14 tahun 2008) tentang keterbukaan informasi publik, dimana setiap badan publik wajib memberikan keterbukaan informasi public